

2024

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKJIP)  
KECAMATAN TENGGARONG  
TAHUN 2023**



**KECAMATAN TENGGARONG  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
TAHUN 2024**



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya berkat rahmat dan hidayah-Nya, Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tenggarong Tahun 2023 dapat diselesaikan. Penyusunan Kecamatan Tenggarong Tahun 2023 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara keseluruhan LKjIP tahun 2023 merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD sesuai Renstra Perubahan tahun 2021-2026 telah dilaksanakan dengan baik. Meskipun demikian, kami menyadari masih terdapat kekurangan-kekurangan yang perlu dibenahi dan ditingkatkan di masa yang akan datang, sehingga kita dapat mewujudkan visi, misi, dan sasaran yang ingin dicapai melalui program dan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan Renstra Perubahan Kecamatan Tenggarong Hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan akuntabel, serta menciptakan Good Governance dan Clean Government.





## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2023

Pada akhirnya laporan ini kiranya dapat memberi manfaat yang optimal bagi peningkatan kinerja dimasa mendatang dan memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi khususnya Kecamatan Tenggarong Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LkjIP ) Kecamatan Tenggarong ini juga dapat berguna sebagaimana mestinya.

Tenggarong, Februari 2024

Camat Tenggarong



**SUKONO,S.Pd,M.PD**  
NIP. 19720213 200701 1 022



## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tenggarong berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (good governance). Oleh karena itu, manajemen pemerintahan yang perlu diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja setidaknya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis suatu organisasi sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur dan dapat diujikan diandalkan.

Berdasarkan saran dan arahan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Suatu indikator kinerja tidak selalu menjelaskan keadaan secara keseluruhan, tetapi kerap kali hanya memberi petunjuk (indikasi) tentang keadaan secara keseluruhan tersebut sebagai suatu perkiraan. Dapat dikatakan indikator bukanlah ukuran yang tetap, melainkan indikasi dari keadaan yang disepakati bersama oleh anggota organisasi yang akan dijadikan sebagai alat ukur. Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKjIP ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Kecamatan Tenggarong Tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut :

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan tahun



## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2023

	publik kecamatan	kecamatan yang ditindak lanjuti	2023
2	Meningkatnya Kinerja dan Tata kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari Inspektorat Daerah-



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i	
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii	
DAFTAR ISI	vi	
DAFTAR TABEL	ix	
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
	A. Latar Belakang	1
	B. Gambaran Umum	2
	C. Struktur Organisasi	5
	D. Tugas Pokok dan Fungsi	7
	E. Sumber Daya Aparatur	19
	F. Sumber Daya Keuangan	20
	G. Isu-Isu Strategis	20
	H. Sistematika Laporan Kinerja	21
<b>BAB II</b>	<b>PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	<b>23</b>
	A. Perencanaan Kinerja	23
	1. Visi dan Misi Kabupaten Kutai Kartanegara	23
	2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	27
	3. Strategi dan Arah Kebijakan	28
	4. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	30
	B. Perjanjian Kinerja	36
	C. Alokasi Anggaran Tahun 2022	39
<b>BAB III</b>	<b>AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>45</b>
	A. Capaian Kinerja Organisasi	45
	B. Analisis Pengukuran Kinerja	52
	1 Analisis Kinerja Sasaran dengan indicator : “Meningkatkan Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Public Kecamatan.”	52



## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2023

2	Analisis kinerja sasaran dengan indicator “Meningkatnya Kinerja dan Tata Kelola Perangkat Daerah”.	53
3	Analisis Kinerja Sasaran dengan Indikator “Temuan Administrasi BPK/Inspektorat Yang di Tindak Lanjut”	54
4	Analisis Kinerja Sasaran dengan indicator “Persentase Melaksanakan dan melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna barang Milik Daerah”.	55
5	Analisis Kinerja Sasaran dengan Indikator “Persentase Pengelolaan Pengadaan barang dan jasa”.	56
6	Analisis Kinerja Sasaran dengan Indikator “Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN pertanggal 31 Maret 2023”.	57
7	Analisis Kinerja Sasaran dengan Indikator “Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah.”	58
8	Analisis Kinerja Sasaran dengan Indikator “Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar dan Aplikasi E-Pantau.”	59
9	Analisis Kinerja Sasaran dengan Indikator “Jumlah Inovasi.”	60
10	Analisis Kinerja Sasaran dengan Indikator “Capaian Output Kegiatan .”	61
11	Analisis Kinerja Sasaran dengan Indikator “Persentase realisasi kegiatan fisik dan Keuangan.”	61
12	Analisis Kinerja Sasaran dengan Indikator “Laporan Penyusunan Manajemen Risiko dan laporan Pengendalian Manajemen risiko maksimal 10 januari.”	63
13	Analisis Kinerja Sasaran dengan Indikator “Dokumen Reviu indicator kinerja utama.”	64
14	Analisis Kinerja Sasaran dengan Indikator “Jumlah kegiatan sosialisasi,internalisasi,penetapan leader,tim budaya kerja.”	65
15	Analisis Kinerja Sasaran dengan Indikator “persentase pengembangan kompetensi ASN.”	66
16	Analisis Kinerja Sasaran dengan Indikator “Indek Keluarga Sehat.”	66
17	Analisis Kinerja Sasaran dengan Indikator “Penurunan prevalensi stunting.”	67
18	Analisis Kinerja Sasaran dengan Indikator “Angka kematian ibu .”	68



## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2023

	Analisis Kinerja Sasaran dengan Indikator 19 “Persentase Desa/Kelurahan Stop buang air besar sembarangan.”	69
	Analisis Kinerja Sasaran dengan Indikator 20 “Persentase Posyandu Aktif.”	70
	Analisis Kinerja Sasaran dengan Indikator 21 “Kawasan tanpa rokok.”	70
	C. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran	76
	D. Realisasi Anggaran	77
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>78</b>
	<b>LAMPIRAN- LAMPIRAN</b>	



**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistemik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Rangkaian sistemik tersebut meliputi proses penyusunan rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta revidu dan evaluasi kinerja.

Kecamatan Tenggarong dalam menyelenggarakan SAKIP telah menyusun:

- (1) Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Kecamatan Tenggarong Tahun 2021-2026;
- (2) Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kecamatan Tenggarong Tahun 2023;
- (3) Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Tenggarong Tahun 2023; dan
- (4) Perjanjian Kinerja (PK) Camat Tenggarong Tahun 2023.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revidu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap instansi perangkat daerah diwajibkan menyusun laporan kinerja. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.



Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2023 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Kecamatan Tenggarong
2. Mendorong Kecamatan Tenggarong di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kecamatan Tenggarong untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Kecamatan Tenggarong di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

#### **B. Gambaran Umum**

Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu daerah otonom di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, yang memiliki karakteristik wilayah yang terbagi menjadi 3 (tiga) zona, yakni: pertama, zona hulu dengan karakteristik wilayah dataran, perbukitan dan perairan sungai dengan kecenderungan potensi ekonomi pada pertanian, perkebunan dan perikanan tangkap dan budidaya perairan sungai, yang terdiri dari 6 (enam) kecamatan, yakni Kecamatan Tabang, Kembang Janggut, Kenohan, Kota Bangun, Muara Muntai dan Muara Wis, kedua, zona tengah dengan kecenderungan karakteristik wilayah dataran, perbukitan dan perairan sungai, potensi ekonomi didominasi pertanian, perikanan, perdagangan dan jasa, terdiri dari 6 (enam) kecamatan, yakni, Kecamatan Muara Kaman, Sebulu, Tenggarong, Tenggarong Seberang, Loa Kulu dan Loa Janan, sedangkan ketiga, zona pesisir dengan kecenderungan karakteristik wilayah dataran, perbukitan dan perairan laut dan muara, potensi wilayah didominasi oleh pertanian dan perikanan, terdiri dari 6 (enam) kecamatan, yakni Kecamatan Marangkayu, Muara Badak, Sanga-Sanga, Anggana, Muara Jawa dan Samboja.

Kecamatan Tenggarong masuk dalam zona tengah yang terletak diantara 116°47' Bujur Timur/Longitude East 117°04' Bujur Timur/Longitude East 0°21' Lintang Selatan/Latitude North 0°21' Lintang Selatan/Latitude South. Kecamatan



## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2023

Tenggarong secara administrative berbatasan dengan, Sebelah Utara : Kecamatan Sebulu, Sebelah Timur : Tenggarong Seberang, Sebelah Selatan : Kecamatan Loa Kulu, Sebelah Barat : Kecamatan Sebulu.

Luas Kecamatan Tenggarong 398,10 Km<sup>2</sup>., Dengan luas daratan 420,10 Secara administratif Kecamatan Tenggarong terdiri atas 2 desa dan 12 kelurahan.

Gambar 1.1. Peta Wilayah Administratif Kecamatan Tenggarong



Dengan luas wilayah desa/ kelurahan di kecamatan tenggarong sebagai berikut :

Tabel 1 Luas wilayah Desa/Kelurahan di Kecamatan Tenggarong

No	Nama Desa/Kelurahan	Luas Wilayah Daratan (Km <sup>2</sup> )	Luas Wilayah Laut (Km <sup>2</sup> )	Luas Wilayah Desa/ Kelurahan (Km <sup>2</sup> )	Keterangan
1	Jahab	161,57	0	161,57	
2	Bukit Biru	13,45	0	13,45	



## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2023

3	Timbau	10,00	0	10,00	
4	Melayu	9,00	0	9,00	
5	Loa Ipuh	67,38	0	67,38	
6	Maluhu	8,00	0	8,00	
7	Panji	13,70	0	13,70	
8	Sukarame	4,00	0	4,00	
9	Baru	7,00	0	7,00	
10	Mangkurawang	20,00	0	20,00	
11	Loa Tebu	52,00	0	52,00	
12	Loa Ipuh Darat	20,00	0	20,00	
13	Rapak Lambur	12,00	0	12,00	
14	Bendang Raya	22,00	0	22,00	
TOTAL		420,10		420,10	

Sumber Data: Bagian Administrasi Pemerintahan kecamatan tenggarong

Jumlah penduduk mencapai 96.209 jiwa (sensus 2010), dan berdasarkan perekaman data melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan semester II tahun 2021 sebanyak 110.666 jiwa. Adapun persebaran jumlah penduduk Kecamatan Tenggarong per kelurahan dan desa :

Tabel 2. Jumlah Penduduk Kecamatan Tenggarong 2023 :

NO.	NAMA DESA/ KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	L + P
1	Jahab	2.305	2.188	4.505
2	Bukit Biru	2.531	2.415	4.946
3	Timbau	8.995	8.632	17.627
4	Melayu	7.890	7.665	15.555
5	Loa Ipuh	13.138	12.485	25.623
6	Maluhu	3.097	2.970	6.067
7	Panji	3.016	2.746	5.762
8	Sukarame	1.931	1.983	3.914
9	Baru	3.040	2.918	5.985
10	Mangkurawang	4.507	4.234	8.741
11	Loa Tebu	2.589	2.297	4.886
12	Loa Ipuh Darat	2.004	1.873	3.877



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**  
**Kecamatan Tenggarong Tahun 2023**

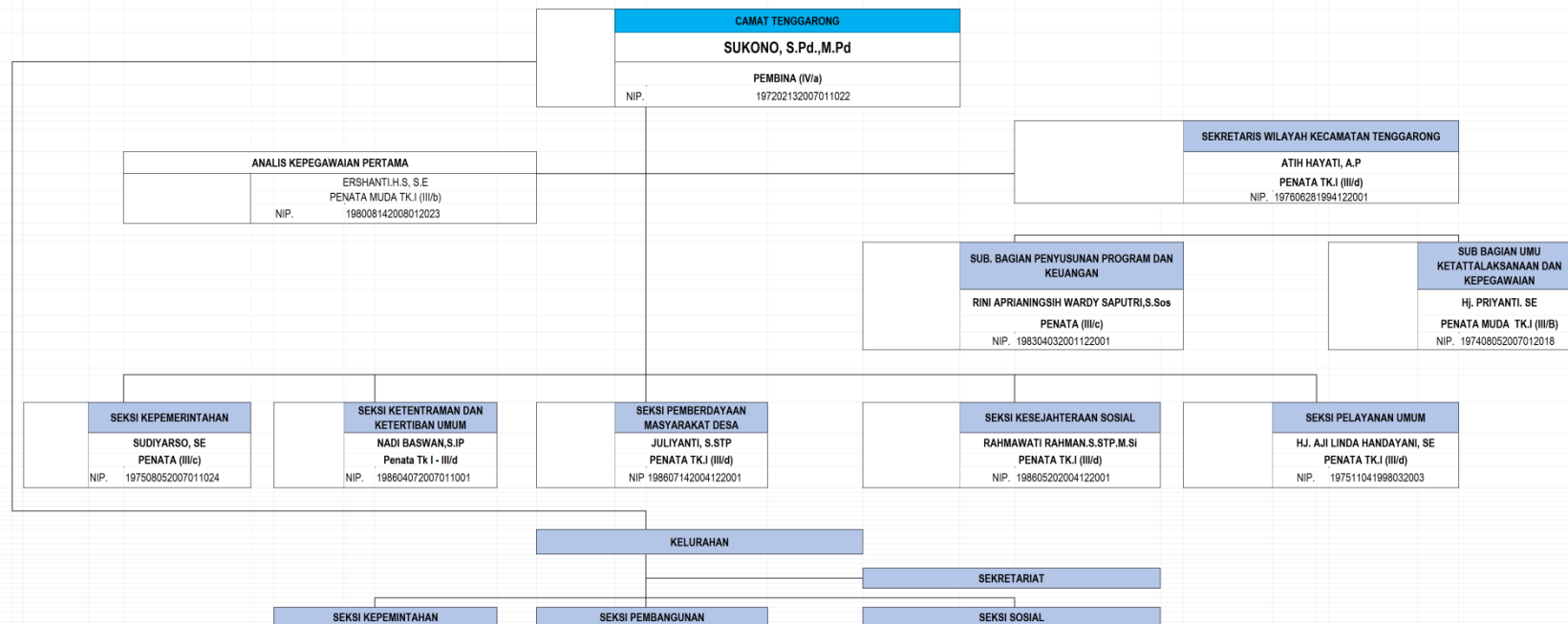
13	Rapak Lambur	1.025	989	2.014
14	Bendang Raya	549	468	1.017
JUMLAH		56.721	53.945	110.666

*Sumber Data: DKB Semester II Tahun 2021 Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil*

**C. Struktur Organisasi**

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN TENGGARONG  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
KECAMATAN TENGGARONG TIPE A  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2023



PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 69 TAHUN 2016 ,TANGGAL 24 OKTOBER 2016  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI , TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA PERANGKAT DAERAH PADA KECAMATAN



Pembentukan Kecamatan Tenggarong berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan struktur organisasi diatur berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Kecamatan, kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh seorang Camat; Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat dalam melaksanakan tugas dibantu oleh perangkat kecamatan terdiri dari:

1. Sekretariat,
  - a. Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
2. Seksi Pemerintahan;
3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
5. Seksi Kesejahteraan Sosial;
6. Seksi Pelayanan Umum;
7. Kelompok Jabatan Fungsional
8. Kelurahan membawahkan :
  - a. Sekretaris;
  - b. Seksi Pemerintahan;
  - c. Seksi Pembangunan; dan
  - d. Seksi Sosial.

#### **D. Tugas Pokok dan Fungsi**

Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh seorang Camat. Camat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Camat melaksanakan tugas dan fungsi :

1. Memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan



- dan mengawasi kegiatan kecamatan.
2. Merumuskan rencana strategis serta kebijakan operasional dibidang tugas pemerintahan, yang meliputi urusan seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum.
  3. Menghimpun dan menyampaikan bahan laporan penyusunan LKPJ dan LPPD setiap akhir tahun ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta penyusunan LKPD setiap akhir tahun ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
  4. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraab ketentraman dan ketertiban umum serta penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
  5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan serta pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
  6. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelayanan administrasiterpadu kecamatan (PATEN), pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa atau Kelurahan dan penanggulangan bencana.
  7. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan, pengendalian program dan kegiatan di tingkat kecamatan.
  8. Membina, melaksanakan kerjasama dan berkoordinasi dengan instansi teknis dan organisasi perangkat daerah lainnya yang menyangkut bidang tugasnya.
  9. Mengkoordinasikan penyusunan Perjanjian Kinerja, Standar Pelayanan (SP), Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Camat.
  10. Mengkoordinasikan, memfasilitasi, menginventarisir, mengidentifikasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap rencana strategis serta kebijakan operasional dibidang tugas umum pemerintahan, yang meliputi urusan seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pemberdayaan masyarakat Desa, Kesejahteraan Sosial dan Pela-



yanan Umum serta membuat laporan pelaksanaan program dan rencana kerja tahunan Kecamatan.

11. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

**SEKRETARIS CAMAT MEMPUNYAI TUGAS MELIPUTI :**

1. Memimpin, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan.
2. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan urusan kesekretariatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
3. Mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi kegiatan dilingkungan Badan yang meliputi perencanaan, anggaran, pengadaan, penyediaan sarana dan prasarana, pembinaan dan pengembangan kepegawaian.
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan administrasi umum meliputi ketata usahaan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, administrasi perkantoran, pengadaan barang/ jasa, pemeliharaan, keamanan, kebersihan, keprotokolan, dan transportasi sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengkoordinasikan pelaksanaan E-Government, kompilasi SOP, Standar Pelayanan (SP), Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, Tim Manajemen Perubahan SKPD, Pengembangan Inovasi SKPD, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, Gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, Whistle Blowing System (WBS) pedoman umum sistem penanganan pengaduan, survey index kepuasan masyarakat, survey internal organisasi, survey index nilai persepsi korupsi.
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan SIMPAG, Kode Etik Pegawai, Evaluasi Jabatan, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, Kompilasi Perjanjian Kinerja dan LP2P.
6. Mengkoordinasikan pelaksanaan LKjIP, Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), RENSTRA, RENJA, LKPJ, LPPD, dan LKPD.



7. Mengkoordinasikan kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM), pembukuan keuangan dan perhitungan anggaran, verifikasi pengelolaan keuangan
8. Mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi kepegawaian meliputi membuat buku kendali kenaikan pangkat, buku kendali kenaikan gaji berkala, buku kendali pensiunan, Daftar Nominatif Presensi Pegawai, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), usul kenaikan pangkat, usul kenaikan gaji berkala, ASKES, TASPEN, TAPERUM, KARPEG, KARIS/KARSU, LHKPN dan/ atau LHKASN, Penghargaan, Pemberian Sanksi dan Cuti sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi dan pengelolaan pengadaan dan penghapusan barang/ jasa.
10. Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Sekretariat.
11. Melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

**URAIAN TUGAS KEPALA SUB BAGIAN UMUM, KETATALASANAAN DAN KEPEGAWAIAN ADALAH:**

Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menganalisis, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan.
2. Menyusun rencana kegiatan urusan Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
3. Mengusulkan pembentukan panitia/pejabat pengadaan barang/jasa dan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Merencanakan dan melaksanakan pengelolaan barang/jasa meliputi menyusun rencana kebutuhan barang/jasa, menerima, menyalurkan, menyimpan, menginventarisasi Barang Milik Daerah (BMD), memelihara barang serta membuat usulan penghapusan barang rusak berat sesuai



dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tertib administrasi pengelolaan BMD.

5. Merencanakan pelaksanaan E-Government, kompilasi SOP, Standar Pelayanan (SP), Perjanjian Kinerja, keterbukaan informasi publik, Tim Manajemen Perubahan SKPD, Pengembangan Inovasi SKPD, zona integritas, penataan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, Gratifikasi, Layanan Pengaduan Masyarakat, Whistle Blowing System (WBS) pedoman umum sistem penanganan pengaduan, survey index kepuasan masyarakat, survey internal organisasi dan survey index nilai persepsi korupsi.
6. Merencanakan pelaksanaan SIMPAG, Kode Etik Pegawai, Evaluasi Jabatan, Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dan Kompilasi Perjanjian Kinerja
7. Merencanakan pelaksanaan administrasi kepegawaian meliputi membuat buku kendali kenaikan pangkat, buku kendali kenaikan gaji berkala, buku kendali pensiunan, Daftar Nominatif Presensi Pegawai, Sasaran Kerja Pegawai (SKP), rekapitulasi kehadiran, laporan kerja pegawai, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), usul kenaikan pangkat, Masa Persiapan Pensiun, ASKES, TASPEN, TAPERUM, KARPEG, KARIS/KARSU, Penghargaan, Pemberian Sangsi, Cuti, pengembangan kompetensi kepegawaian, LHKPN dan/atau LHKASN dan LP2P sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
8. Merencanakan pelaksanaan administrasi ketata usahaan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, administrasi perkantoran, pengadaan barang/jasa, pemeliharaan, keamanan, kebersihan, keprotokolan, dan transportasi sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian.

Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian; dan melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.



**URAIAN TUGAS SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN**

:

Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menganalisis, membimbing, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan.
2. Menyusun rencana kegiatan urusan Penyusunan Program dan Keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
3. Merencanakan, mengkompilasi dan menyiapkan bahan kegiatan penyusunan RENSTRA, RENJA, RKA / DPA, Perjanjian Kinerja, LKjIP, dan LPPD melaporkan ke Camat melalui sekretaris.
4. Merencanakan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), LKPJ dan LKPD.
5. Menganalisis dan meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), dan menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM).
6. Menyusun pembukuan keuangan dan perhitungan anggaran, verifikasi pengelolaan keuangan.
7. Merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja, Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan Penyusunan Program dan Keuangan.
8. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Penyusunan Program dan Keuangan.
9. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

**SEKSI PEMERINTAHAN MEMPUNYAI TUGAS SEBAGAI BERIKUT :**

1. menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan.
2. menyusun rencana kegiatan urusan Pemerintahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.



3. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan dan melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi pertanahan dan kependudukan dan catatan sipil yang menjadi urusan Kecamatan.
4. merencanakan kegiatan, melaksanakan pembinaan serta peningkatan kapasitas Pemerintahan Desa dan atau kelurahan.
5. merencanakan kegiatan, menyelenggarakan proses administrasi bidang pertanahan yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati.
6. merencanakan kegiatan dan memfasilitasi penganalisan materi peraturan desa dan keputusan Lurah yang disampaikan kepada Bupati.
7. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan dan menyusun monografi kecamatan serta pembinaan penyusunan monografi desa dan atau kelurahan.
8. merencanakan kegiatan, memfasilitasi dan melaksanakan pembinaan pelaksanaan tugas pemerintahan desa dan atau kelurahan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), penyelenggaraan pemilihan dan pelantikan Kepala Desa, pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta pembentukan Rukun Tetangga.
9. merencanakan kegiatan, mengidentifikasi dan memfasilitasi pemekaran desa/kelurahan, penataan maupun perselisihan batas wilayah antar desa dan atau kelurahan serta penyelesaian pengaduan masalah pertanahan dalam wilayah Kecamatan.
10. merencanakan kegiatan, melaksanakan koordinasi dan memfasilitasi program transmigrasi dan penataan penduduk serta pelaporan data tanah kas desa dan kekayaan desa.
11. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Urusan Pemerintahan.
12. merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyediaan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Pemerintahan.
13. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Pemerintahan.
14. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang



diberikan oleh Atasan.

#### SEKSI KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Seksi ketentraman, keteriban umum dan perlindungan masyarakat (Tramtib) mempunyai tugas sebagai berikut :

1. menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan.
2. menyusun rencana kegiatan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
3. merencanakan kegiatan, menginventarisir, melakukan pembinaan dan mengevaluasi permasalahan ketentraman dan ketertiban serta melakukan koordinasi dengan unit terkait yang berhubungan dengan ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat Desa/ kelurahan.
4. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan proses administrasi perijinan bidang Politik Dalam Negeri / Izin Gangguan (HO) yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati.
5. merencanakan kegiatan, melakukan upaya preventif terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
6. merencanakan kegiatan, melaksanakan pengumpulan dan pelaporan data keberadaan, kegiatan partai politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat tingkat Kecamatan dan mantan anggota organisasi terlarang serta data WNI keturunan dan WNA.
7. merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan ideologi, organisasi kemasyarakatan dan kesatuan bangsa serta pembinaan kerukunan umat beragama.
8. merencanakan kegiatan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan Pengungsi.
9. merencanakan kegiatan melakukan pencegahan atas penanggulangan permasalahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat, narkotika,



psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya serta pengelolaan Sumber Daya Alam tanpa ijin dan dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup.

10. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
11. merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
12. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
13. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

#### SEKSI PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Seksi pemerdayaan masyarakat desa mempunyai tugas sebagai berikut :

1. menyusun rencana kegiatan urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
2. menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan
3. Menyusun rencana kegiatan urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
4. merencanakan kegiatan dan menyelenggarakan proses administrasi yang meliputi perijinan bidang pertanian, pertambangan, perindustrian, perdagangan, Izin Mendirikan Bangunan dan Pariwisata yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati.
5. merencanakan kegiatan, memfasilitasi, melaksanakan pemberdayaan masyarakat, peningkatan peran serta, prakarsa, dan swadaya gotong royong masyarakat serta pemberdayaan peranan wanita.
6. merencanakan kegiatan, melaksanakan pemantauan dan pelaporan obyek dan



daya tarik wisata, usaha jasa pariwisata dan usaha sarana pariwisata.

7. merencanakan kegiatan, melakukan bimbingan dan pemantauan pengelolaan Lokasi Daur Ulang Sampah (LDUS) dan Air Bersih Perdesaan; merencanakan kegiatan, melaksanakan koordinasi dan sosialisasi rencana tata ruang.
8. merencanakan kegiatan, melakukan pemantauan pelaksanaan penghijauan, konservasi tanah dan air.
9. merencanakan kegiatan, menyusun rencana dan program kegiatan kebersihan, per- tamanan dan keindahan lingkungan.
10. merencanakan kegiatan, menghimpun, mengolah data, membuat bahan masukan untuk pengembangan sarana dan prasarana umum.
11. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
12. merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Pemberdayan Masyarakat Desa.
13. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
14. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

#### SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas sebagai berikut :

1. menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan.
2. menyusun rencana kegiatan urusan Kesejahteraan Sosial sebagai pedoman pelaksana- naan tugas.
3. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan pela- yanan dan bantuan sosial, kepemudaan, peranan wanita dan olah raga, ketenagakerjaan dan transmigrasi.
4. merencanakan kegiatan, menyelenggarakan proses administrasi bidang



ketenagakerjaan AK/ 1 (Pencari Kerja Swasta) dan pendidikan luar sekolah, pemuda dan olah raga yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati.

5. merencanakan kegiatan, melaksanakan koordinasi program yang meliputi bantuan sosial, organisasi social kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Keluarga Ber- encana (KB), Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
6. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan petunjuk dalam rangka pembinaan dan bimbingan terhadap penyelenggaraan kursus keterampilan, kesejahteraan keluarga, peranan wanita dan organisasi kewanitaan.
7. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan bimbingan dan penyuluhan sosial bagi anak terlantar, yatim piatu, penyalahgunaan narkoba dan penyandang masalah sosial.
8. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan kegiatan dalam rangka pembinaan, pengembanganl kepramukaan, karang taruna, organisasi kepemudaan dan keo- lahragaan.
9. merencanakan kegiatan, menyiapkan bahan kegiatan dalam rangka pembinaan pendidi- kan sekolah maupun luar sekolah, dan pendataan sarana dan prasarana pendidikan.
10. merencanakan kegiatan, menghimpun, menyiapkan bahan, mengevaluasi pembinaan keagamaan dan kerukunan hidup beragama dan memfasilitasi pengadaan sarana / prasarana peribadatan dan kehidupan beragama.
11. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja danStandar Operasional Prosedur (SOP) Urusan Kesejahteraan Sosial.
12. merencanakan kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan Daerah urusan Kesejahteraan Sosial.
13. Merencanakan, melaksanakan dan melaporkan Kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan kesejahteraan sosial.
14. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.



#### SEKSI PELAYANAN UMUM

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas sebagai berikut :

1. menganalisis, membimbing, membagi tugas, meneliti dan menilai hasil kerja bawahan.
2. menyusun rencana kegiatan urusan Pelayanan Umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
3. merencanakan kegiatan, meneliti, melakukan verifikasi persyaratan berkas permohonan perijinan dan menetapkan besaran retribusi serta berkoordinasi dengan instansi terkait tentang pelayanan perijinan dan non perijinan.
4. merencanakan kegiatan, mengkoordinasikan pengendalian pengelolaan lampu pen- erangan jalan umum, memfasilitasi dan melakukan pungutan atas pembinaan, peman- tauan pengelolaan sampah dan pemeliharaan lingkungan, pertamanan dan pemakaman.  
erencanakan kegiatan, menyelenggarakan proses administrasi perijinan bidang peker- jaan umum dan bidang perhubungan yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Bupati.
5. merencanakan kegiatan, melakukan bimbingan dan pemantauan pengelolaan sampah dan pemeliharaan kebersihan lingkungan dan taman.
6. merencanakan kegiatan, menghimpun dan mengolah data perencanaan pengembangan kekayaan desa/kelurahan serta pelaporan data tanah kas desa dan kekayaan desa.
7. merencanakan kegiatan, menyusun rencana dan program kegiatan kebersihan, per- tamanan dan keindahan lingkungan.
8. merencanakan kegiatan, menghimpun, memantau, mengolah data, membuat bahan ma- sukan untuk pengembangan sarana dan prasarana umum.  
merencanakan kegiatan, melaksanakan sosialisasi pengendalian perizinan perumahan dan bangunan.
9. merencanakan dan menyiapkan bahan Perjanjian Kinerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Urusan Pelayanan Umum. merencanakan Kegiatan dan mengendalikan penyiapan bahan penyusunan kebijakan



Daerah urusan Pelayanan Umum.

10. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan kegiatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan yang berkaitan dengan urusan Pelayanan Umum.
11. merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan

**E. Sumber Daya Aparatur**

Sumber daya aparatur Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kecamatan Tenggarong per 31 Desember 2023 sebanyak 69 orang. Perincian jumlah tersebut adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan Pendidikan

Tabel 3.PNS berdasarkan Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi
1	SD	1	0	1	1,45%
2	SLTP	1	0	1	1,45%
3	SLTA	20	15	35	50,72%
5	D-I	0	0	0	0,00%
6	D-II	0	0	0	0,00%
7	D-III	0	2	2	2,90%
8	D-IV	1	1	2	1,50%
9	S1	13	13	26	37,68%
10	S2	1	1	2	2,90%
11	S3	0	0	0	0,00%
Jumlah		37	32	69	100,00%

b. Berdasarkan Golongan

Tabel 4.PNS berdasarkan Golongan

No	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi
1	I	1	0	1	1,45%
2	II	19	15	34	49,28%
3	III	13	17	30	43,48%
4	IV	3	1	4	5,80%



## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2023

	Jumlah	36	33	69	100%
--	--------	----	----	----	------

### c. Berdasarkan Eselon

Tabel 5.PNS berdasarkan Eselon

No.	Eselon	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi
1	II.a	0	0	0	0,00%
2	II.b	0	0	0	0,00%
3	III.a	1	0	1	11,11%
4	III.b	1	0	1	11,11%
5	IV.a	2	3	5	55,56%
6	IV.b	0	2	2	22,22%
Jumlah		4	5	9	100,00%

### d. Berdasarkan Jenis Jabatan

Tabel 6.PNS berdasarkan Jabatan

No.	Jenis Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi
1	Struktural	4	5	9	13,04%
2	Fungsional Guru	0	0	0	0,00%
3	Fungsional Non Guru	0	1	1	1,45%
4	Pelaksana	33	26	59	85,51%
Jumlah		37	32	69	100,00%

## F. Sumber Daya Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Tenggarong pada Tahun 2023 berasal dari APBD Pemerintah Daerah. Pada Tahun Anggaran 2023 Kecamatan Tenggarong mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 192.376.376.362,00 yang diperuntukkan untuk belanja langsung dan belanja tak langsung serta untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program pendukung dengan rincian 6 (Enam) program, 14 (Empat belas) kegiatan dan 43 (Empat Puluh Tiga) sub kegiatan.

## G. Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi



tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan pencapaian prioritas pembangunan, dan dapat dipertanggungjawabkan

Isu Strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Tenggarong adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat
2. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
3. Pembangunan kewilayahan
4. Pengarustamaan Gender Dalam Perencanaan Pembangunan
5. Keterbukaan Informasi Publik.

Isu-isu strategis Kabupaten Kutai Kartanegara berhubungan dengan isu-isu Kecamatan terutama pada point 1 Peningkatan pelayanan \kepada masyarakat dan point 2 Tentang pemberdayaan masyarakat sedangkan isu-isu yang lainnya memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Kutai Kartanegara yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu Strategis tersebut secara fungsional saling berhubungan satu dengan lainnya, sehingga upaya penanganan satu isu strategis dapat mendukung atau berdampak positif bagi upaya penanganan isu strategis lainnya.

#### **H. Sistematika Laporan Kinerja**

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Ikhtisar Eksekutif

Kata Pengantar



## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2023

---

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab IV Penutup



## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

### **A. Perencanaan Kinerja**

Setiap instansi pemerintah menyusun dokumen perencanaan sebagai landasan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP). Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tenggarong merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang didalamnya menjabarkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan serta sub kegiatan pembangunan pada Kecamatan Tenggarong yang disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi kecamatan.

Kecamatan Tenggarong telah Menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026, dan setelah melakukan evaluasi terhadap Renstra Tahun 2021 – 2026 sehingga Kecamatan Tenggarong menyusun Renstra Perubahan Tahun 2021-2026.

Renstra perubahan ini didasarkan pada hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana strategis yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 serta adanya penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah, sebagai acuan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

#### **1. Visi dan Misi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026**

Visi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 **“MEWUJUDKAN MASYARAKAT KUTAI KARTANEGARA YANG SEJAHTERA DAN BERBAHAGIA”**

Dalam Dokumen Visi dan Misinya Bupati dan Wakil Bupati Terpilih menjelaskan bahwa terdapat 5 frasa kalimat, diantaranya :

- 1) Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani



## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2023

- 2) Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya
- 3) Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- 4) Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasardan Konektivitas antar Wilayah
- 5) Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan.

Selanjutnya visi misi tersebut dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam bagan alir Cascade RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026. Dalam hal ini Kecamatan Tenggarong mempunyai **Misi pertama** dan **Misi kelima** yang terlihat pada tabel 7 sebagai berikut :

Tabel 7. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

No	Misi	Tujuan Pemda	Indikator Tujuan Pemda	Sasaran Pemda	Indikator Sasaran
1.	Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani	Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai Sakip
				Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	Indeks Persepsi Anti
				Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Presepsi Kualitas Pelayanan Publi
2.	Meningkatkan	Meningkatkan kualitas	Indeks Pembangunan	Meningkatnya Kualitas	Indek pendidikan,In



## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2023

	Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya	pembangunan manusia yang berdaya saing		Layanan Pendidikan, Ketahanan Sosial dan Pelestarian Kebudayaan	dek pembangunan kebudayaan
				Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	Indek Kesehatan
				Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan
				Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat	Indeks gini, Indeks desa membangun
				Menurunnya pengangguran di masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuk
<b>3</b>	Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Terbarukan	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Non Migas dan batu bara		
				Meningkatnya pengelolaan pertanian berbasis potensi unggulan	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan



## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2023

				daera	Perikanan
				Berkembangnya Ekosistem Ekonomi Kreatif	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kreati
				Meningkatnya daya saing investasi daerah	Tingkat Pertumbuhan
4	Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah	Meningkatkan Pemerataan Infracstruktur dan Penataan Wilayah	Indeks Kesulitan geografis, Presentase penurunan kawasan kumuh		
				Meningkatnya kualitas permukiman masyarakat dan ketersediaan air bersih	Cakupan layanan air bersih persentase rumah layak huni
				Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah	Indeks Aksesibilitas Wilayah
5	Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan	Meningkatkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	Persentase Penurunan		
				Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan
				Meningkatnya ketahanan bencana daerah	Indeks Risiko Bencana



Berangkat dari Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai tugas dan pokok fungsinya, Kecamatan Tenggarong berupaya mendukung pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah yaitu :

- a. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan dengan indikator Predikat Akuntabilitas Kinerja;
- b. Meningkatnya pelayanan publik pemerintahan daerah dengan indicator Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Komponen Penilaian RB);
- c. Meningkatnya aksesibilitas antar dan inter wilayah dengan indicator Cakupan Aksesibilitas antar Wilayah.

## 2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

### a. Tujuan

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan Kecamatan Tenggarong dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun. Mengacu pada Sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan, maka Tujuan yang relevan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tenggarong adalah Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kecamatan yang Efektif, Efisien, Inovatif, Transparan dan Akuntabel

### b. Sasaran

Berdasarkan pada Tujuan yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Tenggarong, maka Sasaran yang hendak dicapai terlihat pada tabel 8 sebagai berikut :

Tabel 8. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Tenggarong Tahun 2016-2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahunan					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan	Meningkatnya kualitas dan jangkauan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan	Persen	73	70	68	65	60	50



## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2023

	Kecamatan yang Efektif, Efisien, Inovatif, Transparan dan Akuntabel	n pelayanan publik kecamatan	kecamatan yang ditindaklanjuti							
		Meningkatnya Kinerja dan Tata kelola Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	Nilai	N/A	75	76	78	79	80

### c. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan rangkaian langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan perangkat daerah. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Arah kebijakan perangkat daerah merupakan keputusan dari stakeholder sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Adapun strategi dan arah kebijakan Kecamatan Tenggarong Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 9 berikut :

Tabel 9. Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Tenggarong

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKA
Meningkatkan	Meningkatnya	Meningkatkan Penyelenggaraan	Meningkatkan Penyelenggaraan



## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2023

Kualitas Pelayanan Kecamatan yang Efektif, Efisien, Inovatif, Transparan dan Akuntabel	kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
		Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatkan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
		Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatkan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
		Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatkan Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
	Meningkatnya kinerja dan tata kelola Kecamatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Meningkatkan fasilitas penunjang pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah
		Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatkan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa



## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2023

### d. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian sasaran pada Tahun 2023, sebagaimana tercantum pada tabel 10 berikut ini:

Tabel 10. Keterkaitan Sasaran dengan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2023

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindak lanjuti			
Meningkatnya Kinerja dan Tata kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN



## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2023

				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
				Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD



## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2023

				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				Pengadaan Mebel
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				Pengadaan Aset Tetap Lainnya
				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat



## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2023

				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha



## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2023

				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan n Desa</b>	
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
			<b>Kegiatan Pemberdayaa n Kelurahan</b>	
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
			<b>Pemberdayaa n Lembaga Kemasyaraka tan Tingkat Kecamatan</b>	
				Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan
				Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan



**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
Kecamatan Tenggarong Tahun 2023**

				Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
		<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	
				Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>	<b>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	
				Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
		<b>PROGRAM PENYELENGGAAN JALAN</b>	<b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>	
				Pembangunan Jalan



## B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra Perubahan Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Tahunan (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Perjanjian kinerja Kecamatan Tenggarong Tahun 2023 sebagaimana terlihat pada tabel 11 berikut :

Tabel 11. Perjanjian Kinerja Kecamatan Tenggarong Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	68
		Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	0
2	Meningkatnya Kinerja dan Tata kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	67



## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2023

3,	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah	Temuan Administrasi BPK/Inspektorat Yang di Tindak Lanjuti	Jumlah	2
4,	Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah	Persentase Pelaksanakan dan Pelaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah	Persen	100
5,	Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil tidak diskriminatif dan akuntabel	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa	Persen	100
6,	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100
7,	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	B (60-70)



## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2023

8,	Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar dan Aplikasi e-Pantau	Persen	100
9,	Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah	Jumlah Inovasi	Jumlah	1
10,	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100
11,	Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan	Persentase realisasi kegiatan fisik	Persen	100
		Persentase realisasi keuangan	Persen	100
12,	Melaksanakan Manajemen Resiko terhadap program kegiatan di perangkat daerahnya	Laporan Penyusunan Manajemen Resiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Resiko maksimal 10 Januari	Laporan	2
13,	Melaksanakan reviu awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah sesuai dengan data terkini	Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama	Dokumen	1
14,	Melaksanakan tata kelola Core Values ASN "BERAHLAK"	Jumlah kegiatan sosialisasi, internalisasi, penetapan leader, Tim budaya kerja	Kegiatan	4
15,	Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Persen	100
16,	Meningkatnya Indeks Kesehatan Keluarga di Kecamatan	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Angka	0,40



## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2023

17,	Terlaksananya koordinasi konvergensi penurunan stunting di Kecamatan	Penurunan Prevalensi stunting	Persen	16,50
18,	Menurunnya Angka Kematian Ibu	Angka Kematian Ibu (AKI) di kecamatan	Angka	1
19,	Mewujudkan Desa/Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	Persentase Desa/Kelurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS)	Persen	45
20,	Meningkatnya Posyandu Aktif	Persentase Posyandu Aktif	Poin	100
21,	Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah	Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Perkantoran	Poin	100

### C. Alokasi Anggaran Tahun 2023

Pada tahun Anggaran 2023, Kecamatan Tenggarong melaksanakan kegiatan yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 132.675.820.056,00 Melalui mekanisme perubahan APBD Tahun 2023 yang bersumber dari APBD-P meningkat sebesar Rp. 192.376.376.362,00

Tabel 12. Alokasi Anggaran Kecamatan Tenggarong Tahun 2023

Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
<b>Alokasi Anggaran</b>	Rp. 132.675.820.056,00	Rp. 192.376.376.362,00	Rp.59.700.556.306,00

#### 1. Alokasi Anggaran Belanja

Perencanaan pelaksanaan anggaran belanja dan setelah perubahan anggaran belanja Kecamatan Tenggarong Tahun 2023 dengan rincian pada tabel berikut ini :

Tabel 13. Alokasi Anggaran Kecamatan Tenggarong Tahun 2023



## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2023

Tabel 13. Alokasi Anggaran Belanja Kecamatan Tenggarong Tahun 2023

Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
Belanja Operasi	Rp. 94.130.872.862,00	Rp. 95.268.923.756	Rp. 1.138.050.894,00
Belanja Modal	Rp. 38.544.947.194,00	Rp. 97.107.452.606	Rp. 58.562.505.412,00
<b>Total</b>	Rp. 132.675.820.056,00	Rp. 192.376.376.362,00	Rp. 59.700.556.306,00

2. Alokasi Anggaran per Sasaran Perencanaan pelaksanaan anggaran Tahun 2023, Kecamatan Tenggarong mengalokasikan anggaran berdasarkan per sasaran (IKU) sebagaimana pada tabel 14 berikut ini:

Tabel 14. per Sasaran Tahun 2023

Sasaran	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan			
Meningkatnya Kinerja dan Tata kelola Perangkat Daerah	94.130.872.862,00	192.376.376.362,00	98.245.503.500,00
<b>Total</b>	94.130.872.862,00	192.376.376.362,00	98.245.503.500,00

3. Alokasi Anggaran per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Tenggarong Tahun 2023 merencanakan 6 (enam) program, 16 (enam belas) kegiatan, dan 47 (empat puluh tujuh) sub kegiatan dengan rincian pada tabel 15 berikut ini:



## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2023

Tabel 15. Alokasi Anggaran per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023

No	Program/ Kegiatan	SebelumPerubahan	SetelahPerubahan	Bertambah/ (Berkurang)
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	43.514.982.329	50.311.756.503	6.796.774.174
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	230.000.000	230.000.000	0
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	125.000.000,00	125.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	50.000.000,00	50.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.000.000,00	25.000.000,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000,00	30.000.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	35.616.168.828	35.454.362.126	(161.806.702)
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	34.687.481.544,00	34.525.674.842,00	(161.806.702)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	50.000.000,00	50.000.000,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	878.687.284,00	878.687.284,00	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	51.604.584	51.604.584	0
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	51.604.584,00	51.604.584,00	
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	15.000.000	15.000.000	
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	15.000.000	15.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	892.130.000	892.130.000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		479.400.000,00	479.400.000,00
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		412.730.000,00	412.730.000,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.818.299.299	3.999.450.723	2.181.151.424
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	41.391.994	79.087.994	37.696.000
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	150.000.000	150.000.000	0
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.073.174.194	2.159.384.618	1.086.210.424



## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2023

	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30.825.000	202.613.000	171.788.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	186.840.957	411.003.957	224.163.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	94.657.154	109.657.154	15.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	241.410.000	887.704.000	646.294.000
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	887.431.000	4.248.850.452	3.361.419.452
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	180.000.000	1.355.300.000	1.175.300.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	127.000.000	314.178.502	187.178.502
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	93.600.000	93.600.000
	Pengadaan Mebel	53.000.000	239.505.000	186.505.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	77.431.000	667.823.000	590.392.000
	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	150.000.000	524.982.000	374.982.000
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	300.000.000	1.053.461.950	753.461.950
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	4.323.088.914	4.615.818.914	292.730.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.510.000	2.510.000	0
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	720.317.280	905.317.280	185.000.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59.517.998	167.247.998	107.730.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.540.743.636	3.540.743.636	0
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	573.389.704	804.539.704	231.150.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	80.643.000	100.643.000	20.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	109.334.704	230.064.704	120.730.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.890.000	81.000.000	48.110.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	350.522.000	392.832.000	42.310.000
2	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	41.765.186.848	90.877.266.848	49.112.080.000



## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2023

	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	41.765.186.848	90.877.266.848	49.112.080.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	150.000.000	232.080.000	82.080.000
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	41.615.186.848	90.645.186.848	49.030.000.000
<b>3</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	46.867.948.973	50.600.062.105	3.732.113.132
	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	7.000.000.000	150.000.000	(6.850.000.000)
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.000.000.000	150.000.000	(6.850.000.000)
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	24.495.675.146	35.124.528.278	10.628.853.132
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	433.084.446	266.158.500	(166.925.946)
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	6.590.470.700	15.980.349.778	9.389.879.078
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	17.472.120.000	18.878.020.000	1.405.900.000
	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	15.372.273.827	15.325.533.827	(46.740.000)
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	13.181.729.831	13.181.729.831	0
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	1.268.922.996	1.263.862.996	(5.060.000)
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	737.506.000	698.826.000	(38.680.000)
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	184.115.000	181.115.000	(3.000.000)
<b>4</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	81.700.500	157.009.500	75.309.000
	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	81.700.500	157.009.500	75.309.000
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	81.700.500	157.009.500	75.309.000
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>	117.512.012	239.738.021	122.226.009



## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2023

	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	117.512.012	239.738.021	122.226.009
	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	117.512.012	239.738.021	122.226.009
<b>6</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN</b>	<b>328.489.394</b>	<b>190.543.385</b>	<b>(137.946.009)</b>
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	328.489.394	190.543.385	(137.946.009)
	Pembangunan Jalan	328.489.394	190.543.385	(137.946.009)
	<b>Total</b>	<b>132.675.820.056</b>	<b>192.376.376.362</b>	<b>59.700.556.306</b>



### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan bentuk akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja diwujudkan dalam pelaporan kinerja melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja sehingga dapat diketahui capaian kinerjanya, sumber daya yang mendukung keberhasilan atau ketidakberhasilan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja.

Pelaporan kinerja Kecamatan Tenggarong Tahun 2023, disajikan melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sub bab ini akan disajikan target kinerja dalam perjanjian kinerja, pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja, capaian kinerja tahun sebelumnya, capaian kinerja dengan target pembangunan jangka menengah, analisis efisiensi penggunaan sumber daya disbanding dengan capaian kinerja dan analisis program dan kegiatan yang mendukung capaian target kinerja, serta diuraikan cara pengukuran kinerja, dan analisis pencapaian kinerja sasaran. Analisis pencapaian kinerja menjelaskan cara menghitung, capaian kinerja, membandingkan realisasi dengan target, capaian tahun lalu. Kemudian dijelaskan program yang mendukung per sasaran, realisasi anggaran persasaran, faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran, sertaprestasi yang terkait sasaran/ indicator kinerja.

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Untuk mengukur persentase capaian kinerja dari masing-masing indicator maka ada dua jenis rumus yang digunakan yaitu :

1. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang



semakin baik, atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin rendah maka digunakan rumus sebagai berikut :

2. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase Capaian} = 1 + \frac{\text{Target} - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pengukuran terhadap pencapaian komponen kegiatan dan sasaran ini dituangkan dalam form Pengukuran Kinerja (PK).

Selanjutnya untuk menilai dan menyimpulkan sampai sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran tersebut digunakan alat bantu berupa **skala ordinal**. Adapun skala ordinal yang digunakan dalam laporan akuntabilitas ini adalah sebagai berikut :

Skala Ordinal Pengukuran Sasaran		
No	Nilai Kinerja	Predikat Kinerja
1	≥95	Sangat Berhasil
2	80 s/d <95	Berhasil
3	50 s/d <80	Cukup Berhasil
4	<50	Kurang Berhasil

Hasil dari pengukuran kinerja melalui skala ordinal tersebut digunakan untuk menilai sampai sejauh mana tingkat keberhasilan maupun



## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2023

ketidak berhasilan kinerja guna meningkatkan dan memperbaiki kinerja organisasi, serta mengidentifikasi faktor-faktor apa yang menjadi hambatan dan kendala pencapaian sasaran, untuk selanjutnya menjadi bahan perumusan langkah dan strategi kedepan yang perlu dilaksanakan.

Hasil pengukuran kinerja Kecamatan Tenggarong atas Perjanjian Kinerja (PK) Camat Tahun 2023 yang terdiri dari 2 sasaran sesuai Renstra dan 19 sasaran tambahan, adalah sebagai berikut :

Tabel 16. Rekapitulasi Capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Tenggarong Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	KATEGORI KINERJA
1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	68	68,6	101	sangat berhasil
		Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	0	2		
2	Meningkatnya Kinerja dan Tata kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	67			
3,	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah	Temuan Administrasi BPK/Inspektorat Yang di Tindak Lanjuti	Jumlah	2	1	50	cukup berhasil



## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2023

4,	Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah	Persentase Pelaksanaan dan Pelaporan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah	Persen	100	100	100	sangat berhasil
5,	Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil tidak diskriminatif dan akuntabel	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa	Persen	100	100	100	sangat berhasil
6,	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100	100	100	sangat berhasil
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100	100	100	sangat berhasil
7,	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Perangkat	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	B (60-70)			sangat berhasil



## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2023

	Daerah						
8,	Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukur dan Aplikasi e-Pantau	Persen	100	100	100	sangat berhasil
9,	Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah	Jumlah Inovasi	Jumlah	1	1	100	sangat berhasil
10,	Terealisasi Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100	100	100	sangat berhasil
11,	Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan	Persentase realisasi kegiatan fisik	Persen	100	85	85	Berhasil
		Persentase realisasi keuangan	Persen	100	85	85	Berhasil
12,	Melaksanakan Manajemen Resiko terhadap program kegiatan di perangkat daerahnya	Laporan Penyusunan Manajemen Resiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Resiko maksimal 10 Januari	Laporan	2	2	100	sangat berhasil



## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2023

13,	Melaksanakan reviu awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah sesuai dengan data terkini	Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama	Dokumen	1	1	100	sangat berhasil
14,	Melaksanakan tata kelola Core Values ASN "BERAHL AK"	Jumlah kegiatan sosialisasi, internalisasi, penetapan leader, Tim budaya kerja	Kegiatan	4	4	100	sangat berhasil
15,	Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Persen	100	60	60	Berhasil
16,	Meningkatkan Indeks Kesehatan Keluarga di Kecamatan	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Angka	0,40	0,40	100	sangat berhasil
17,	Terlaksananya koordinasi konvergensi penurunan stunting di Kecamatan	Penurunan Prevalensi stunting	Persen	16,50	16,6	100	sangat berhasil
18,	Menurunkan Angka Kematian Ibu	Angka Kematian Ibu (AKI) di kecamatan	Angka	1	1	100	sangat berhasil
19,	Mewujudkan Desa/Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	Persentase Desa/Kelurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS)	Persen	45	45	100	sangat berhasil
20,	Meningkatkan Posyandu Aktif	Persentase Posyandu Aktif	Poin	100	100	100	sangat berhasil



## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2023

21,	Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah	Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Perkantoran	Poin	100	100	100	sangat berhasil
-----	--	--	------	-----	-----	-----	-----------------

Berdasarkan Renstra Kecamatan Tenggarong Tahun 2021-2026, pada tahun 2023 Kecamatan Tenggarong memiliki 2 (dua) sasaran dan 2 (dua) indikator sasaran yang digunakan untuk mengukur ketercapaian sasaran tersebut. Namun, pada tahun 2023 ini oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, menetapkan seluruh Perangkat Daerah untuk membantu memperbaiki dan meningkatkan beberapa indikator tolak ukur keberhasilan pembangunan di Kutai Kartanegara. Sehingga pada tahun 2023, Kecamatan Tenggarong memiliki 21 (Dua Puluh Satu) sasaran dan 24 (Dua Puluh Empat) indikator sasaran. Berdasarkan kriteria penilaian kinerja yang dilakukan, capaian indicator kinerja dapat dikategorikan sebagai berikut :

- Capaian kinerja  $\geq 95$  % kategori “sangat berhasil” sebanyak 18 Indikator, atau 86 %;
- Capaian kinerja 80 s/d <95% kategori “berhasil” sebanyak 2 Indikator, atau 10%;
- Capaian kinerja 50 s/d <80% kategori “cukup berhasil” sebanyak 2 Indikator, atau 10 % dan
- Capaian kinerja 0 s/d < 50% kategori “kurang berhasil” sebanyak 0 Indikator, atau 0 %.

Dari hasil capaian kinerja dan realisasi kinerja kecamatan tenggarong lebih banyak dengan kategori sangat berhasil daripada berhasil dan cukup berhasil. Ini menunjukkan tingkat keberhasilan dari capaian dan realisasi bisa tercapai dengan baik.

Dengan tingkat keberhasilan dari capaian kinerja dan realisasi kinerja kecamatan tenggarong pada tahun 2023 meningkat daripada capain kinerja dan realisasi kinerja pada tahun 2022.



## B. Analisis Pengukuran Kinerja

Hasil pengukuran kinerja dapat dianalisis sebagai berikut :

### 1. Analisis Kinerja Sasaran dengan indikator : “Meningkatkan Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Public Kecamatan.”

Akuntabilitas kinerja perangkat daerah dilaksanakan bertujuan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja perangkat daerah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, dan terpercaya. Tolak ukur capaian sasaran Meningkatkan Kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan diukur dengan 1 (Satu) indikator dalam tabel sebagai berikut :

Tabel .....

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	68	68.6	100 %
		Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	0	2	kegiatan

Indikator Pertama yaitu Persentase Keluhan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan yang ditindaklanjuti sangat berhasil dengan demikian keluhan terhadap pelayanan tidak ada.

Sedangkan untuk realisasi kinerja tahun 2023 dengan standar nasional tidak ada. Dalam capaian kinerja ini menunjukkan keberhasilan dikarenakan sistem pelayanan yang sudah memenuhi standar pelayanan dan sumber daya manusia



yang sudah terlatih. Adapun program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan selain dari pelayanan yang optimal dan SDM yang memadai dan terlatih yaitu program.....

Indikator kedua yaitu Persentase capaian ketentraman dan ketertiban umum hanya melaksanakan kegiatan dilapangan dimana berupa penyerahan bantuan pada kejadian dimasyarakat. Dalam tahun 2023 ini kegiatan ini terlaksana 2 kegiatan sedangkan pada tahun 2022 kegiatan ini tidak ada.

## **2. Analisis kinerja sasaran dengan indikator “Meningkatnya Kinerja dan Tata Kelola Perangkat Daerah”.**

Rumusan dari indikator Nilai Sakip Perangkat Daerah terlihat pada tabel berikut ini :

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
				Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Kinerja dan Tata kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	67		

Pencapaian kinerja indikator ini diuraikan sebagai berikut:

Target kinerja “Nilai Sakip Perangkat Daerah” tahun 2023, realisasi atas capaian kinerja indikator ini tidak dapat dilakukan pengukuran karena di tahun 2023 Kecamatan Tenggarong belum dilakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Inspektorat Daerah.

Walaupun Tahun 2023 di Kecamatan Tenggarong tidak dilakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Inspektorat Daerah, tetapi kewajiban perangkat daerah terhadap pemenuhan dokumen-dokumen terkait Akuntabilitas Kinerja telah dilaksanakan, seperti Menyusun Dokumen Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan



pelaporan kinerja perangkat daerah. Pemenuhan atas kewajiban tersebut dapat dilihat dalam Aplikasi <https://sakip.kukarkab.go.id/>.

### 3. Analisis Kinerja Sasaran dengan Indikator “Temuan Administrasi BPK/Inspektorat Yang di Tindak Lanjut”.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK )/ Inspektorat Daerah” dengan indikator Temuan Administrasi BPK/Inspektorat Yang di Tindak Lanjut, untuk tahun 2023 masih ditemukan 1 dan dalam tahap penyelesaian sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Rumusan dari indikator predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 17 Pengukuran Kinerja dengan indikator Temuan Administrasi BPK/Inspektorat Yang di Tindak Lanjut

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1.	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah	Temuan Administrasi BPK/Inspektorat Yang di Tindak Lanjut	Jumlah Temuan Administrasi BPK/Inspektorat yang telah ditindak lanjuti perangkat daerah.

Tabel 18 Realisasi Indikator Sasaran Temuan Administrasi BPK/Inspektorat Yang di Tindak Lanjut Tahun 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	% Capaian
1.	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan	Temuan Administrasi BPK/Inspektorat Yang di Tindak Lanjut	Jumlah	2	1	50



## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2023

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah						
---	--	--	--	--	--	--

Pencapaian kinerja indikator ini diuraikan sebagai berikut:

Pencapaian kinerja indicator ini bisa dikategorikan berhasil dikarenakan sudah ada progres dalam tahap proses penyelesaian sementara untuk kendala yang dihadapi tidak ada kendala karna penyelesaian ini masih berjalan sampai dengan tahun berikutnya yaitu tahun 2024.

Sementara untuk tingkat keberhasilan pada tahun 2022 dibanding dengan tahun 2023 lebih mengalami peningkatan pada tahun 2023 dalam penyelesaian temuan tersebut.

Untuk standar kinerja tahun ini dengan standar nasional tidak ada. Sedangkan untuk keberhasilan dalam tindak lanjut temuan ini yaitu dengan adanya kerjasama dengan pihak ke tiga dimana pihak ketiga tersebut memenuhi kewajibannya untuk menganti yang menjadi temuan oleh BPK.

#### 4. Analisis Kinerja Sasaran dengan indicator “Persentase Melaksanakan dan melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna barang Milik Daerah”.

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	% Capaian
1.	Melaksanakan dan Melaporkan	Persentase Melaksanakan dan	Persen	100	100	100



Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada Pengguna Barang Daerah	Daerah di Milik	Pelaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah				
---	-----------------------	---	--	--	--	--

Hasil pengukuran capaian kinerja ini menunjukkan sangat berhasil yaitu dengan capaian 100 %.Sementara untuk capaian ini tidak ada pada tahun 2022 sehingga tidak bisa membandingkan capaian realisasi.

Dan untuk realisasi kinerja pada sasaran dan indicator ini tidak ada pada standar nasional.

Untuk penyebab keberhasilan pada indicator ini dimana pengurus barang sudah membuat laporan barang milik daerah untuk tahun 2023.

#### **5.Analisis Kinerja Sasaran dengan Indikator “Persentase Pengelolaan Pengadaan barang dan jasa”.**

Hasil pengukuran capaian kinerja ini menunjukkan sangat berhasil yaitu dengan capaian 100 %.Sementara untuk capaian ini tidak ada pada tahun 2022 sehingga tidak bisa membandingkan capaian realisasi.

Dan untuk realisasi kinerja pada sasaran dan indicator ini tidak ada pada standar nasional.

Adapun yang membuat keberhasilan dalam sasaran dan indicator ini yaitu dengan adanya penghapusan setiap barang yang sudah tidak bisa digunakan lagi.Dengan demikian barang yang sudah menjadi rusak berat bisa dihapuskan.



## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2023

Adapun sasaran dan indikator ini terdapat pada tabel dibawah ini :

Tabel.....

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	% Capaian
1.	Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil tidak diskriminatif dan akuntabel	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa	Persen	100	100	100

### 6. Analisis Kinerja Sasaran dengan Indikator ‘Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN pertanggal 31 Maret 2023’.

Adapun untuk melihat capaian realisasi pada indikator ini terdapat pada tabel dibawah ini :

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	% Capaian
1.	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan	Persen	100	100	100



## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2023

Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	LHKPN Pertanggal 31 Maret 2023				
---	--------------------------------------	--	--	--	--

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Mewujudkan Tingkat Kepatuhan atas laporan harta kekayaan penyelenggara negara ( LHKPN )dan Laporan Harta kekayaan Aparatur Sipil Negara serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2023 mencapai **100 %** dan termasuk predikat **“Sangat Berhasil”**.Adapun penyebab keberhasilan dalam capaian realisasi ini yaitu dimana tingkat kesadaran ASN sangat tinggi untuk menyampaikan kewajibannya.

### 7.Analisis Kinerja Sasaran dengan Indikator “Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah.”

Rumusan dari indikator Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah terlihat pada tabel berikut ini :

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	% Capaian
1.	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	B (60-70)	85	122

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah” dengan Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah



mencapai **100%** dan termasuk predikat **“Sangat Berhasil”** sebagaimana disajikan dalam tabel diatas. Dalam hal ini Capaian kinerja pada tahun 2023 meningkat dibandingkan dengan tahun 2022. Sedangkan untuk perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional tidak ada.

Dan untuk SDM dalam pengelolaan arsip sudah memadai dengan adanya diklat dan pelatihan dari pengelola Arsip. Adapun Program dan kegiatan yang menunjang dari kerberhasilan adalah Program penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan kegiatannya Penata usahaan Arsip Dinamis.

#### 8. Analisis Kinerja Sasaran dengan Indikator **“Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar dan Aplikasi E-Pantau.”**

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran **“Pemenuhan ketersediaan data dan informasi pembangunan berdasarkan fungsi perangkat daerah”** dengan indikator **Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar dan Aplikasi E-Pantau** mencapai **100 %** dan termasuk predikat **“Sangat Berhasil”** sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	% Capaian
1.	Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar dan Aplikasi e-Pantau	Persen	100	100	100

Dalam hal ini tingkat kerberhasilan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2023 menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2022. Dan untuk analisis penyebab keberhasilan dalam penginfutan ini dimana setiap



PPTK melaksanakan kewajibannya memenuhi pelaporan dalam setiap kegiatan yang sudah direalisasikan. Sedangkan untuk membandingkan realisasi kinerja dengan standar nasional tidak ada.

#### 9. Analisis Kinerja Sasaran dengan Indikator “Jumlah Inovasi.”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah ” dengan indikator Jumlah Inovasi mencapai **100 %** dan termasuk predikat “**Sangat Berhasil**” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	% Capaian
1.	Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah	Jumlah Inovasi	Jumlah	1	1	100

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah” dengan indikator Jumlah Inovasi tahun 2023 lebih berhasil dibandingkan dengan tahun 2022 .



### 10. Analisis Kinerja Sasaran dengan Indikator “Capaian Output Kegiatan.”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Terealisasinya output kegiatan tanpa menimbulkan potensi utang” dengan indikator Capaian output kegiatan mencapai **100 %** dan termasuk predikat “**Sangat Berhasil**” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	% Capaian
1.	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	persen	100	100	100

Pencapaian kinerja indikator ini diuraikan sebagai berikut :

Target kinerja “Terealisasinya output kegiatan tanpa menimbulkan potensi utang” tahun 2023 dengan target 100 % dan realisasi atas capaian kinerja indikator ini dapat dilakukan pengukuran karena di tahun 2023 Kecamatan Tenggarong telah mencapai keberhasilan.

Untuk perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja 2022 mengalami peningkatan keberhasilan capaian kinerja karena tidak adanya utang.

### 11. Analisis Kinerja Sasaran dengan Indikator “Persentase realisasi kegiatan fisik dan Keuangan.”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan” dengan indikator Persentase realisasi



## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2023

fisik dan keuangan mencapai **85 %** dan termasuk predikat **“Berhasil”** sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	% Capaian
1.	Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan	Persentase realisasi kegiatan fisik	persen	100	85	85
		Persentase realisasi keuangan	persen	100	85	85

Pencapaian kinerja indikator ini diuraikan sebagai berikut :

Target kinerja “Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan” tahun 2023 dengan target 100 % dan realisasi atas capaian kinerja indicator ini 85 % dapat dilakukan pengukuran karena di tahun 2023 dan dikategorikan berhasil dimana tingkat keberhasilan ini ada beberapa **kendala** dalam pencairan yaitu didalam pelaksanaan kegiatan dilapangan dan disistem e-katalog.

Untuk perbandingan pada tahun 2022 realisasi kegiatan ini lebih banyak serapan dan hampir 100 % diandingkan pada tahun 2023 dan disamping itu juga pada tahun 2023 lebih banyak kegiatan. Sementara untuk sumber daya sudah memadai.



12. Analisis Kinerja Sasaran dengan Indikator “Laporan Penyusunan Manajemen Risiko dan laporan Pengendalian Manajemen risiko maksimal 10 Januari.”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Melaksanakan manajemen risiko terhadap program kegiatan perangkat daerahnya” dengan indikator Laporan penyusunan manajemen risiko dan laporan pengendalian manajemen risiko maksimal 10 mencapai **100 %** dan termasuk predikat sangat berhasil sebagaimana disajikan dalam tabel dibawah ini :

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	% Capaian
1.	Melaksanakan Manajemen Risiko terhadap program kegiatan perangkat daerahnya di	Laporan Penyusunan Manajemen Risiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Risiko maksimal 10 Januari	Laporan	2	2	100

Pencapaian kinerja indikator ini diuraikan sebagai berikut :

Target kinerja “Melaksanakan laporan penyusunan manajemen risiko dan laporan pengendalian manajemen risiko ” tahun 2023 dengan target 2 Laporan dan realisasi atas capaian kinerja indicator ini 2 laporan dan telah dilakukan pengukuran karena di tahun 2023 dan dikategorikan sangat berhasil dimana tingkat keberhasilan ini tidak terdapat **kendala** dalam penyusunan laporan manajemen risiko tersebut.



Sedangkan untuk perbandingan pada tahun 2022 belum ada termasuk didalam perjanjian kinerja sehingga kami belum bisa membuat perbandingan capaian dari realisasi.

### 13. Analisis Kinerja Sasaran dengan Indikator “Dokumen Reviu indicator kinerja utama.”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Melaksanakan reviu awal terhadap indicator kinerja utama perangkat daerah sesuai dengan data terkini” dengan indikator Dokumen reviu indicator kinerja utama mencapai **100 %** dan termasuk predikat sangat berhasil sebagaimana disajikan dalam tabel dibawah ini :

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	% Capaian
1.	Melaksanakan reviu awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah sesuai dengan data terkini	Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama	Dokumen	1	1	100

Pencapaian kinerja inidikator ini diuraikan sebagai berikut :

Target kinerja “dokumen reviu indicator kinerja utama ” tahun 2023 dengan target 1 dokumen dan realisasi atas capaian kinerja indicator ini 1 dokumen dan telah dilakukan pengukuran karena di tahun 2023 dan dikategorikan **sangat berhasil** dimana tingkat keberhasilan ini tidak terdapat kendala. untuk perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja belum bisa diambil perbandingan.



#### 14. Analisis Kinerja Sasaran dengan Indikator “Jumlah kegiatan sosialisasi, internalisasi, penetapan leader, tim budaya kerja.”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Melaksanakan tata kelola core values ASN BERAHLAK” dengan indikator JUmlah kegiatan sosialisasi, internalisasi, penetapan leader, tim budaya kerja mencapai **100 %** dan termasuk predikat sangat berhasil sebagaimana disajikan dalam tabel dibawah ini :

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	% Capaian
1.	Melaksanakan tata kelola Core Values ASN “BERAHLAK”	Jumlah kegiatan sosialisasi, internalisasi, penetapan leader, Tim budaya kerja	kegiatan	4	4	100

Pencapaian kinerja indikator ini diuraikan sebagai berikut :

Target kinerja “jumlah kegiatan sosialisasi, penetapan leader, tim budaya kerja” tahun 2023 dengan target 4 kegiatan dan realisasi atas capaian kinerja indicator ini 4 kegiatan dan telah dilakukan pengukuran karena di tahun 2023 dan dikategorikan **sangat berhasil** dimana tingkat keberhasilan ini tidak terdapat kendala. untuk perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja belum bisa diambil perbandingan dengan tahun 2022 Karena indicator ini tidak termasuk .



### 15. Analisis Kinerja Sasaran dengan Indikator “persentase pengembangan kompetensi ASN.”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Melaksanakan pengembangan kompetensi ASN minimal 20 JP pertahun” dengan indikator Persentase pengembangan kompetensi ASN mencapai **60 %** dan termasuk predikat berhasil sebagaimana disajikan dalam tabel dibawah ini :

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	% Capaian
1.	Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Persen	100	60	60

Pencapaian kinerja indikator ini diuraikan sebagai berikut :

Target kinerja “Melaksanakan pengembangan kompetensi ASN minimal 20 JP pertahun” tahun 2023 dengan target 100 % dan realisasi atas capaian kinerja indicator ini 60 % dan telah dilakukan pengukuran karena di tahun 2023 dan dikategorikan **berhasil** dimana tingkat keberhasilan ini tidak terdapat kendala. untuk perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja belum bisa diambil perbandingan dengan tahun 2022 Karena indicator ini tidak termasuk .

### 16. Analisis Kinerja Sasaran dengan Indikator “Indek Keluarga Sehat.”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya indeks kesehatan keluarga dikecamatan” dengan indikator kinerja indeks keluarga sehat



## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2023

target angka **0,4** dan realisasi 0,4 dengan capaian kinerja 100 % ini termasuk predikat sangat berhasil sebagaimana disajikan dalam tabel dibawah ini :

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Indeks Kesehatan Keluarga di Kecamatan	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Angka	0,4	0,4	100

Untuk perbandingan antara realisasi kinerja dengan target kinerja serta capaian yang akan dicapai ini sudah termasuk sangat berhasil karna dari yang ditargetkan sesuai dengan yang realisasinya.

Adapun untuk perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022 tidak bisa diambil perbandingan karena sasaran ini tidak ada.

Untuk penggunaan sumber daya sudah memadai dengan kemampuan yang ada sehingga tidak adanya permasalahan atau kendala dalam mencapai sasaran tersebut.sedangkan untuk realisasi kinerja dengan standar nasional tidak ada.

### 17.Analisis Kinerja Sasaran dengan Indikator “Penurunan prevalensi stunting.”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Terlaksananya Koordinasi konvergensi penurunan stunting di kecamatan” dengan penurunan prevalensi stunting mencapai **100 %** dan termasuk predikat sangat berhasil sebagaimana disajikan dalam tabel dibawah ini :



## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	% Capaian
1.	Terlaksananya koordinasi konvergensi penurunan stunting di Kecamatan	Penurunan Prevalensi stunting	Persen	16,5	16,5	100

Dalam sasaran ini menjelaskan tentang keberhasilan penanganan stunting tahun 2023 dimana untuk capaian dan realisasi sangat berhasil.

Ini menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan dalam sasaran ini tidak banyak kendala atau permasalahan yang ada. Dan untuk sumber daya yang ada sudah memadai.

### 18. Analisis Kinerja Sasaran dengan Indikator “Angka kematian ibu .”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Menurunnya angka kematian ibu” dengan indikator kinerja Angka kematian ibu dan sasaran ini mencapai **100 %** dan termasuk predikat sangat berhasil sebagaimana disajikan dalam tabel dibawah ini :

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	% Capaian
1.	Menurunnya Angka Kematian Ibu	Angka Kematian Ibu (AKI) di kecamatan	Angka	1	1	100

Sasaran kinerja ini menjelaskan tentang menurunnya angka kematian ibu dimana antara target dan realisasi kinerja sangat berhasil. Sementara



untuk perbandingan tahun 2023 dengan perbandingan tahun 2022 tidak bisa diambil perbandingan karena untuk tahun 2022 sasaran ini tidak ada.

Untuk sasaran ini penyebab kegagalannya sangat sedikit karena sumber daya yang ada sudah memadai dan perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional belum ada.

### 19. Analisis Kinerja Sasaran dengan Indikator “Persentase Desa/Kelurahan Stop buang air besar sembarangan.”

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	% Capaian
1.	Mewujudkan Desa/Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	Persentase Desa/Kelurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS)	Persen	45	45	100

Sasaran ini menjelaskan tentang himbauan stop buang air besar sembarangan ( SBS ) dan untuk realisasi kinerja sudah berhasil dengan demikian untuk himbauan ini sudah berjalan dengan baik.

Untuk perbandingan sasaran tahun 2023 dengan sasaran tahun 2022 tidak bisa diambil perbandingan karena untuk sasaran ini tidak ada.

Sementara untuk kegagalan atau keberhasilan sasaran ini sangat tergantung pada warga setempat untuk kesadaran dalam pengendalian dan himbauan tersebut dan dengan solusi adanya himbauan tersebut sudah menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat sudah sangat tinggi.



## 20. Analisis Kinerja Sasaran dengan Indikator “Persentase Posyandu Aktif.”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Meningkatnya posyandu aktif” dengan indikator kinerja Persentase posyandu aktif, sasaran ini capaian **100 %** dan termasuk predikat sangat berhasil sebagaimana disajikan dalam tabel dibawah ini :

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Posyandu Aktif	Persentase Posyandu Aktif	Poin	100	100	100

Sasaran ini menjelaskan tentang posyandu aktif dilingkungan setempat dimana dalam sasaran ini sangat pentingnya peran posyandu. Dan untuk realisasi kinerja sangat bagus karna capaian 100 % dalam hal ini menjelaskan tingkat keberhasilan posyandu yang aktif.

Untuk perbandingan sasaran tahun 2023 dengan tahun 2022 tidak bisa membandingkan dikarenakan sasaran ini tidak ada.

Dan untuk sumber daya manusianya sudah terampil dan terlatih sehingga sasaran untuk posyandu aktif bisa terpenuhi, Sementara untuk realisasi kinerja dengan standar nasional tidak ada.

## 21. Analisis Kinerja Sasaran dengan Indikator “Kawasan tanpa rokok.”

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Mewujudkan kawasan tanpa rokok diperkantoran pemerintah” dengan indikator kinerja Kawasan tanpa rokok, sasaran ini capaian **100 %** dan termasuk predikat sangat berhasil sebagaimana disajikan dalam tabel dibawah ini :



## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	% Capaian
1.	Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di perkantoran pemerintah	Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Perkantoran	Poin	100	100	100

Sasaran ini menjelaskan tentang kawasan bebas asap rokok dilingkungan perkantoran pemerintahan. Untuk sasaran ini realisasi capaian sangat berhasil. Walaupun ada kendala dengan kurangnya tingkat kesadaran, tetapi dengan adanya himbauan dan poster stop merokok maka tingkat kesadaran sudah meningkat. Dan untuk perbandingan sasaran ini tahun 2023 dengan perbandingan sasaran 2022 tidak bisa karena sasaran ini tidak ada.



## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2023

Perjanjian Kinerja Tahun 2023, berbeda dengan perjanjian kinerja tahun-tahun sebelumnya, karena selain sasaran dan indikator kinerja utama yang tertuang dalam renstra perangkat daerah, juga memuat sasaran dan indikator tambahan. Indikator tambahan dituangkan dalam perjanjian kinerja atas permasalahan yang masih ada dan belum mendapat perhatian, sehingga dengan dimuat dalam perjanjian kinerja, diharapkan permasalahan tersebut mendapat perhatian untuk diselesaikan.

Indikator tambahan ada di Tahun 2022 dan tahun 2023, sehingga tidak semua capaian kinerja tahun 2023 bisa dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022. Berikut Rekapitulasi Pengukuran capaian kinerja Tahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 19 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023 dibandingkan Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CAPAIAN KINERJA		KET
			2022	2023	
1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	1 Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	95	101	
		2 Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0	2	Kegiatan
2	Meningkatnya Kinerja dan Tata kelola Perangkat Daerah	1 Nilai SAKIP Perangkat Daerah	68,6		untuk tahun 2023 belum ada penilaian
3	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan	1 Temuan Administrasi BPK/Inspektorat Yang di Tindak Lanjuti	-	-	



## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2023

	(BPK)/ Inspektorat Daerah					
4	Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah	1	Persentase Pelaksanaan dan Pelaporan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah	100	100	
5	Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil tidak diskriminatif dan akuntabel	1	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa	-	100	
6	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	1	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2023	100	100	
			Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023	100	100	
7	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah		Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	70	sangat baik	



## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2023

8	Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah		Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar dan Aplikasi e-Pantau	100	100	
9	Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah		Jumlah Inovasi	100	100	
10	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang		Capaian Output Kegiatan	100	100	
11	Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan		Persentase realisasi kegiatan fisik		85	
12	Melaksanakan Manajemen Resiko terhadap program kegiatan di perangkat daerahnya		Laporan Penyusunan Manajemen Resiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Resiko maksimal 10 Januari		100	
13	Melaksanakan reviu awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah sesuai dengan data terkini		Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama		100	
14	Melaksanakan tata kelola Core Values ASN "BERAHLAK"		Jumlah kegiatan sosialisasi, internalisasi, penetapan leader, Tim budaya kerja		100	



## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2023

15	Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun		Persentase Pengembangan Kompetensi ASN		60	
16	Meningkatnya Indeks Kesehatan Keluarga di Kecamatan		Indeks Keluarga Sehat (IKS)		100	
17	Terlaksananya koordinasi konvergensi penurunan stunting di Kecamatan		Penurunan Prevalensi stunting		100	
18	Menurunnya Angka Kematian Ibu		Angka Kematian Ibu (AKI) di kecamatan		100	
19	Mewujudkan Desa/Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)		Persentase Desa/Kelurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS)		100	
20	Meningkatnya Posyandu Aktif		Persentase Posyandu Aktif		100	
21	Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah		Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Perkantoran		100	

Dari data pada tabel diatas secara garis besar untuk sasaran capaian kinerja 2023 menunjukkan angka peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2022, Hal ini disebabkan sumber daya manusia yang sudah memadai dan trampil sehingga memudahkan dalam mencapai pelaksanaan kegiatan. Dari setiap sasaran sudah masuk dalam kategori sangat berhasil walaupun masih ada beberapa dalam kategori berhasil.



### C. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Analisis efisiensi penggunaan anggaran dapat disampaikan informasi sebagai berikut:

#### a) Perbandingan persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase realisasi atau penyerapan anggaran

Analisis efisiensi penggunaan anggaran melalui perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase penyerapan anggaran, yang dijelaskan sebagai berikut:

- a) Efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran mencapai 100% atau lebih dan persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.
- b) Tidak efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran kurang dari 100%, dan persentase penyerapan anggaran lebih besar dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.

Hasil analisis persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dan persentase penyerapan anggaran, disajikan sebagai berikut:

Tabel 20 Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2023

No.	Sasaran	% Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran	Ket
1.	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	101	192.376.376.362	187.368.115.085	97,40	Efisien
2.	Meningkatnya Kinerja dan Tata kelola Perangkat					



## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2023

Daerah					
--------	--	--	--	--	--

Berdasarkan analisis tingkat capaian sasaran dibandingkan penyerapan anggaran, dari 2 sasaran menunjukkan 1(satu) efisien karena sasaran dapat dicapai sebesar 100% atau lebih dan persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran, terdapat 1 (satu) sasaran tidak bisa dijelaskan, karena untuk capain kinerja belum ada nilai,

### D.Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran program/kegiatan Tahun Anggaran 2023 yang ada pada Kecamatan Tenggarong dalam rangka mencapai indikator kinerja sasaran strategis adalah sebesar 97,40 %, adapun realisasi anggaran dapat dilihat lebih rinci pada tabel berikut dibawah ini :

Tabel 21 Realisasi Anggaran Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindak lanjuti					
Meningkatnya Kinerja dan Tata kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	Rp45.515.798.082	Rp42.170.039.877	92,65	3.345.758.205
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	230.000.000	176.861.796	76,90%	53.138.204
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	125.000.000	77.477.296	61,98%	47.522.704
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	50.000.000	47.550.900	95,10%	2.449.100

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.000.000	23.585.400	94,34%	1.414.600
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30.000.000	28.248.200	94,16%	1.751.800
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	35.454.362.126	33.424.490.492	94,27%	2.029.871.634
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	34.525.674.842	32.544.081.136	94,26%	1.981.593.706
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	50.000.000	41.705.540	83,41%	8.294.460
		<b>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</b>	Rp413.120.000	Rp413.120.000	100	Rp -

		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	51.604.584	51.190.000	99,20%	414.584
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	51.604.584	51.190.000	99,20%	414.584
		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	15.000.000	14.435.000	96,23%	565.000
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	15.000.000	14.435.000	96,23%	565.000
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	892.130.000	844.681.000	94,68%	47.449.000
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	479.400.000	446.836.000	93,21%	32.564.000

		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	412.730.000	397.845.000	96,39%	14.885.000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.999.450.723	3.763.930.625	94,11%	235.520.098
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	79.087.994	76.343.400	96,53%	2.744.594
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	150.000.000	123.843.000	82,56%	26.157.000
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.159.384.618	2.070.255.008	95,87%	89.129.610
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	202.613.000	156.150.700	77,07%	46.462.300

		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	411.003.957	379.695.150	92,38%	31.308.807
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	109.657.154	90.758.250	82,77%	18.898.904
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	887.704.000	866.885.117	97,65%	20.818.883
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.248.850.452	4.116.460.850	96,88%	132.389.602
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.355.300.000	1.349.926.184	99,60%	5.373.816

		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	314.178.502	309.502.245	98,51%	4.676.257
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	93.600.000	75.492.188	80,65%	18.107.812
		Pengadaan Mebel	239.505.000	225.336.000	94,08%	14.169.000
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	667.823.000	661.255.000	99,02%	6.568.000
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	524.982.000	509.710.500	97,09%	15.271.500
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.053.461.950	985.238.733	93,52%	68.223.217
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.615.818.914	4.286.883.933	92,87%	328.934.981
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.510.000	2.510.000	100,00%	0

		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	905.317.280	654.910.643	72,34%	250.406.637
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	167.247.998	146.850.000	87,80%	20.397.998
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.540.743.636	3.482.613.290	98,36%	58.130.346
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	804.539.704	591.336.397	73,50%	213.203.307

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.643.000	59.817.382	59,44%	40.825.618
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	230.064.704	111.345.000	48,40%	118.719.704
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	81.000.000	35.740.000	44,12%	45.260.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	392.832.000	384.434.015	97,86%	8.397.985

		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	190.543.385	189.425.518	99,41%	1.117.867
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	190.543.385	189.425.518	99,41%	1.117.867
		Pembangunan Jalan	190.543.385	189.425.518	99,41%	1.117.867
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	90.877.266.848	90.080.853.104	99,12%	796.413.744
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	90.877.266.848	90.080.853.104	99,12%	796.413.744

		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	232.080.000	222.825.200	96,01%	9.254.800
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	90.645.186.848	89.858.027.904	99,13%	787.158.944
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	50.600.062.105	49.447.136.367	97,72%	1.152.925.738
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	150.000.000	142.400.000	94,93%	7.600.000

		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	150.000.000	142.400.000	94,93%	7.600.000
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	35.124.528.278	34.884.087.988	99,32%	240.440.290
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	266.158.500	258.869.000	97,26%	7.289.500
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	15.980.349.778	15.889.485.113	99,43%	90.864.665
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	18.878.020.000	18.735.733.875	99,25%	142.286.125

		Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	15.325.533.827	14.420.648.379	94,10%	904.885.448
		Penyelenggaraan Lembaga Masyarakat	13.181.729.831	12.399.905.000	94,07%	781.824.831
		Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat	1.263.862.996	1.172.881.829	92,80%	90.981.167
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Masyarakat	698.826.000	670.794.000	95,99%	28.032.000
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	181.115.000	177.067.550	97,77%	4.047.450

		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	157.009.500	144.095.220	91,77%	12.914.280
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	157.009.500	144.095.220	91,77%	12.914.280
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	157.009.500	144.095.220	91,77%	12.914.280
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	239.738.021	236.334.783	98,58%	3.403.238

		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	239.738.021	236.334.783	98,58%	3.403.238
		Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	239.738.021	236.334.783	98,58%	3.403.238
		<b>Jumlah</b>	192.376.376.362	187.368.115.085	97,40%	5.008.261.277



Pemerintah

**Laporan Kinerja Instansi**

**Kecamatan Tenggarong Tahun 2021**





## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tenggarong tahun 2023 merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja Perangkat Daerah serta seluruh pemangku kepentingan baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dan dapat sebagai sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Penyelenggaraan kegiatan di Kecamatan Tenggarong pada Tahun Anggaran 2023 merupakan tahun kelima dari Renstra Kecamatan Tenggarong Tahun 2021-2026. Kecamatan Tenggarong telah dapat merealisasikan pencapaian sasaran strategis pada tahun 2023.

Tabel 22. Hasil Capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Tenggarong Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	KATEGORI KINERJA
1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	68	68,6	101	sangat berhasil
		Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	0	2		
2	Meningkatnya Kinerja dan Tata kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	67			
3,	Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/	Temuan Administrasi BPK/Inspektora t Yang di Tindak Lanjuti	Jumlah	2	1	50	cukup berhasil



## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2022

	Inspektorat Daerah						
4,	Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah	Persentase Pelaksanaan dan Pelaporan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah	Persen	100	100	100	sangat berhasil
5,	Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil tidak diskriminatif dan akuntabel	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa	Persen	100	100	100	sangat berhasil
6,	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100	100	100	sangat berhasil



## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2022

		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100	100	100	sangat berhasil
7,	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	B (60-70)			sangat berhasil
8,	Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar dan Aplikasi e-Pantau	Persen	100	100	100	sangat berhasil
9,	Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah	Jumlah Inovasi	Jumlah	1	1	100	sangat berhasil
10,	Terealisasi Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100	100	100	sangat berhasil
11,	Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan	Persentase realisasi kegiatan fisik	Persen	100	85	85	Berhasil
		Persentase realisasi keuangan	Persen	100	85	85	Berhasil
12,	Melaksanakan Manajemen Resiko terhadap program kegiatan di	Laporan Penyusunan Manajemen Resiko dan Laporan Pengendalian Manajemen	Laporan	2	2	100	sangat berhasil



## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2022

	perangkat daerahnya	Resiko maksimal 10 Januari					
13,	Melaksanakan reviu awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah sesuai dengan data terkini	Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama	Dokumen	1	1	100	sangat berhasil
14,	Melaksanakan tata kelola Core Values ASN "BERAHL AK"	Jumlah kegiatan sosialisasi, internalisasi, penetapan leader, Tim budaya kerja	Kegiatan	4	4	100	sangat berhasil
15,	Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Persen	100	60	60	Berhasil
16,	Meningkatnya Indeks Kesehatan Keluarga di Kecamatan	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Angka	0,40	0,40	100	sangat berhasil
17,	Terlaksananya koordinasi konvergensi penurunan stunting di Kecamatan	Penurunan Prevalensi stunting	Persen	16,50	16,6	100	sangat berhasil
18,	Menurunnya Angka Kematian Ibu	Angka Kematian Ibu (AKI) di kecamatan	Angka	1	1	100	sangat berhasil
19,	Mewujudkan Desa/Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	Persentase Desa/Kelurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS)	Persen	45	45	100	sangat berhasil
20,	Meningkatnya	Persentase Posyandu	Poin	100	100	100	sangat berhasil



## Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tenggarong Tahun 2022

	Posyandu Aktif	Aktif					
21,	Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah	Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Perkantoran	Poin	100	100	100	sangat berhasil

Berdasarkan kriteria penilaian kinerja yang dilakukan, capaian indikator kinerja dapat dikategorikan sebagai berikut:

- Capaian kinerja  $\geq 95\%$  kategori “sangat berhasil” sebanyak 18 Indikator, atau 99,31%;
- Capaian kinerja 80 s/d  $<95\%$  kategori “berhasil” sebanyak 2 Indikator, atau 9,09%;
- Capaian kinerja 50 s/d  $<80\%$  kategori “cukup berhasil” sebanyak 2 Indikator, atau 27,27%; dan
- Capaian kinerja 0 s/d  $<50\%$  kategori “kurang berhasil” sebanyak 0 Indikator,

Tabel 23. Anggaran Rincian Belanja Pagu dan Realisasi Tahun 2023

Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
Belanja Operasi	Rp 95.268.923.756	Rp 90.677.735.924	95,18
Belanja Modal	Rp 97.107.452.606	Rp 96.690.379.161	99,57
	Rp 192.376.376.362	Rp 187.368.115.085	97,40

Capaian kinerja tahun 2023 meningkat dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2022 capaian kinerja Kecamatan Tenggarong sebesar 92,84 % atau terjadi peningkatan kinerja sebesar **97,40%**



#### **4.2 Perbaikan Kedepan**

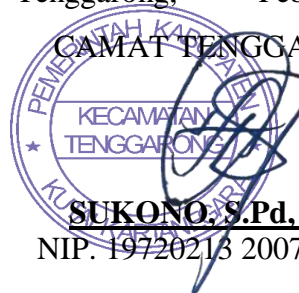
Berdasarkan hasil analisis terhadap factor penghambat dan pendukung capaian kinerja tahun 2023, maka rencana perbaikan kedepan adalah sebagai berikut :

- 1) Mempertahankan dan lebih meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Mempertahankan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Pengembangan sistem pelaporan. harus ditingkatkan lagi
- 4) Kualitas Pelayanan masyarakat harus ditingkatkan lagi
- 5) Mempertahankan dan lebih meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan
- 6) Mempertahankan dan lebih meningkatkan Pembangunan dan Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan dan jembatan Kecamatan
- 7) Harus lebih banyak koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tenggarong Tahun 2023, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja selanjutnya.

Tenggarong, Februari 2023

CAMAT TENGGARONG



**SUKONO, S.Pd, M.PD**

NIP. 19720213 200701 1 022



## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Luas wilayah Desa/Kelurahan Kecamatan Tenggarong .....	3
Tabel 2	Jumlah Penduduk Kecamatan Tenggarong Tahun 2022.....	4
Tabel 3	PNS berdasarkan Pendidikan .....	19
Tabel 4	PNS berdasarkan Golongan .....	19
Tabel 5	PNS berdasarkan Eselon .....	20
Tabel 6	PNS berdasarkan Jabatan .....	20
Tabel 7	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.....	24
Tabel 8	Tujuan dan Sasaran Kecamatan Tenggarong Tahun 2021-2026.....	27
Tabel 9	Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Tenggarong .....	28
Tabel 10	Keterkaitan Sasaran dengan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2022.....	30
Tabel 11	Perjanjian Kinerja Kecamatan Tenggarong Tahun 2022 .....	36
Tabel 12	Alokasi Anggaran Kecamatan Tenggarong Tahun 2022 .....	39
Tabel 13	Alokasi Anggaran Belanja Kecamatan Tenggarong Tahun 2022.....	40
Tabel 14	Alokasi Anggaran per Sasaran Tahun 2022 .....	40
Tabel 15	Alokasi Anggaran per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan .....	41
Tabel 16	Rekapitulasi Capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Tenggarong Tahun 2022.....	47
Tabel 17	Pengukuran Kinerja dengan indikator Temuan Administrasi BPK/Inspektorat Yang di Tindak Lanjut .....	54
Tabel 18	Realisasi Indikator Sasaran Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022 .....	54
Tabel 19	Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023 dibandingkan Tahun 2022 .....	72
Tabel 20	Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2023 .....	76
Tabel 21	Realisasi Anggaran Tahun 2022.....	97
Tabel 22	Hasil Capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Tenggarong Tahun 2023.....	111
Tabel 23	Anggaran Rincian Belanja Pagu dan Realisasi Tahun 2023 .....	115

